

MENGHORMATI MASYARAKAT DAN KOMUNITAS LOKAL

RESPECTING PEOPLES AND LOCAL COMMUNITIES



MENGHORMATI MASYARAKAT DAN KOMUNITAS LOKAL ***RESPECTING PEOPLES AND LOCAL COMMUNITIES***

Kirana Megatara berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia terkait karyawan, pekerja, masyarakat dan komunitas lokal. Kami percaya hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan adalah salah satu faktor utama bagi keberlanjutan bisnis kami. Untuk itu, penting bagi kami memastikan bahwa praktek bisnis kami sejalan dengan kebijakan tersebut.

Kirana Megatara is committed to respecting the human rights of its employees, workers, peoples, and local communities. We believe that maintaining positive relationships among all of our stakeholders is fundamental to our organization's sustainability. Therefore, we must ensure that our business practices are consistent with this policy.

Tenaga Kerja Lokal

Kami berusaha secara maksimal untuk selalu menyerap tenaga kerja dari komunitas masyarakat di sekitar lokasi kerja kami. Saat ini, sebagian besar pekerja kami berasal dari wilayah di sekitar lokasi operasional kami dan kami menargetkan untuk menjaga rasio ini.

Local Labour

We constantly recruit workers from the local communities to be the backbone of our local factory workforces. This is also part of our commitment to have our business grow together with the community. Currently, a majority of our factory workforces come from the surrounding community, and we intend to maintain this ratio

Tabel 1. Rasio Pekerja Lokal dan Nonlokal
Tabel 1. Ratio of Local and Non-local Employee

	2022	2023	2024
Pekerja Lokal	96,7%	96,6%	91,68%
Pekerja Non-Lokal	3,3%	3,4%	8,32%

PADIATAPA - Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan Resolusi Konflik Lahan

Kirana Megatara menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan. Kami tidak akan melakukan dan tidak akan berkontribusi, langsung atau tidak langsung, dalam tindakan apapun yang dapat mengarah pada penggunaan lahan secara tidak sah yang merugikan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Kami mendukung dan mematuhi semua perundang-undangan nasional dan peraturan yang berlaku tentang penggunaan lahan, sesuai dengan pedoman dari PBB perihal PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan).

FPIC - Free, Prior and Informed Consent and Land Dispute Resolution

Kirana Megatara respects and protects indigenous peoples' and local communities' rights. We will not undertake or participate, directly or indirectly, in any action that may result in illegal use of land and losses for indigenous peoples and local communities. We respect and adhere to all applicable national land use laws and regulations in accordance with United Nations principles on Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

These steps are the steps that we set to maintain the FPIC principles:

Langkah-langkah yang kami tetapkan agar prinsip-prinsip PADIATAPA tetap terjaga adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi pendahuluan berdasarkan data sekunder untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial budaya dan kemungkinan dampak aktivitas perusahaan terhadap kondisi sosial sekitar.

1. *Conduct preliminary studies based on secondary data to identify socio-cultural values and the possible impact of company activities to surrounding social conditions.*
2. *Prepare engagement/discussion materials along with local people and communities.*

2. Menyiapkan materi untuk keterlibatan/diskusi dengan masyarakat dan komunitas sekitar.
3. Mengidentifikasi dan memetakan kelompok sosial yang mewakili.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dan komunitas lokal untuk menerima bantuan dari pihak ketiga untuk berdiskusi/berhubungan dengan perusahaan jika mereka memilih untuk melakukannya.
5. Mendorong prinsip saling menghormati dalam pelibatan/diskusi.

Kami juga telah menetapkan alur proses jika terdapat konflik mengenai lahan dengan tetap menghormati dan melibatkan masyarakat dan komunitas lokal. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Penerimaan aduan terkait lahan secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.
2. Pencatatan dan pemberkasan aduan yang diterima.
3. Verifikasi internal dan eksternal secara komprehensif.
4. Proses penyelesaian konflik.
5. Pelaporan hasil kegiatan.

Hingga saat ini tidak tercatat konflik tenurial di semua wilayah kami beroperasi. Meski demikian, dalam setiap perluasan perkebunan yang dilakukan oleh Kirana Megatara di masa depan, kami berkomitmen untuk mengikuti proses PADIATAPA yang komprehensif, yang memastikan penghormatan penuh terhadap hak hukum dan adat seluruh komunitas lokal dan masyarakat adat atas wilayah dan tanah mereka. Alur proses FPIC dan penyelesaian konflik lahan dijelaskan dalam gambar berikut:

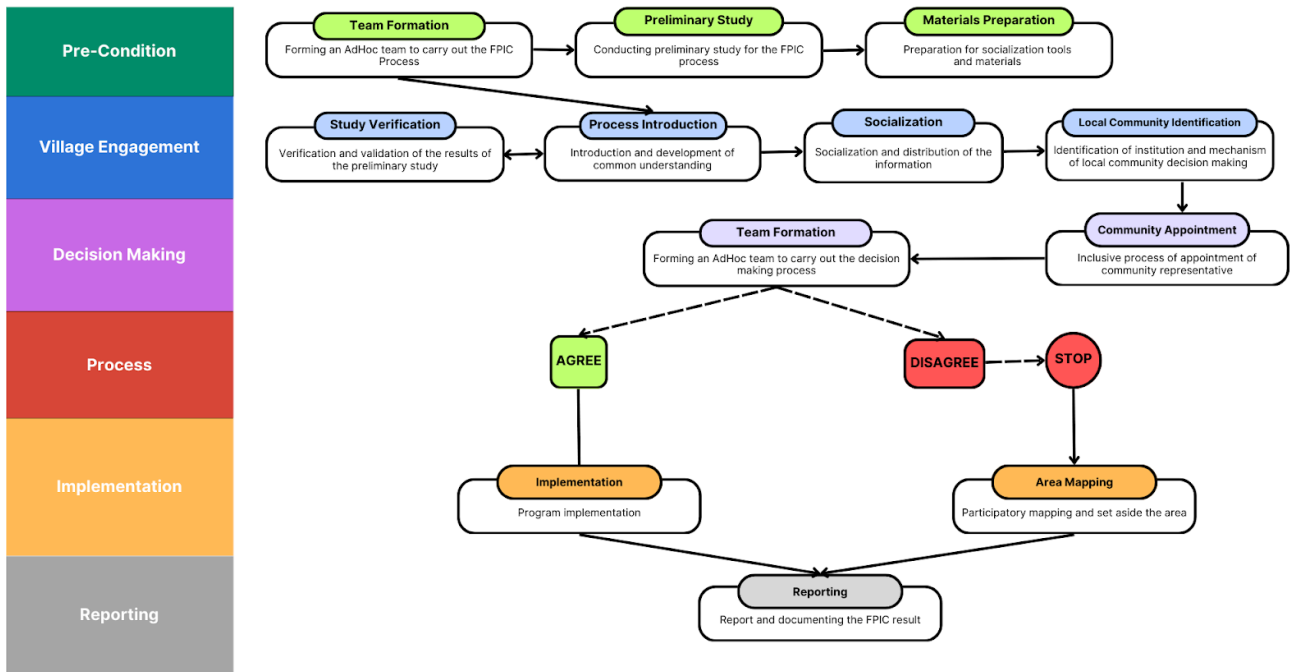
3. *Identify the representative social groups and peoples.*
4. *Provide opportunities for local people and communities to receive assistance from third parties to discuss/engage with the company if they choose to do so.*
5. *Encourage mutual respect in discussions/involvement.*

We also set a procedural flow in place for dealing with land disputes while respecting and involving local people and communities. These steps are:

1. *Receives land-related grievances either directly or via the communication media.*
2. *Records and stores grievances that are received.*
3. *Comprehensive external and internal verification.*
4. *Resolution process of the conflicts.*
5. *Activity result reports.*

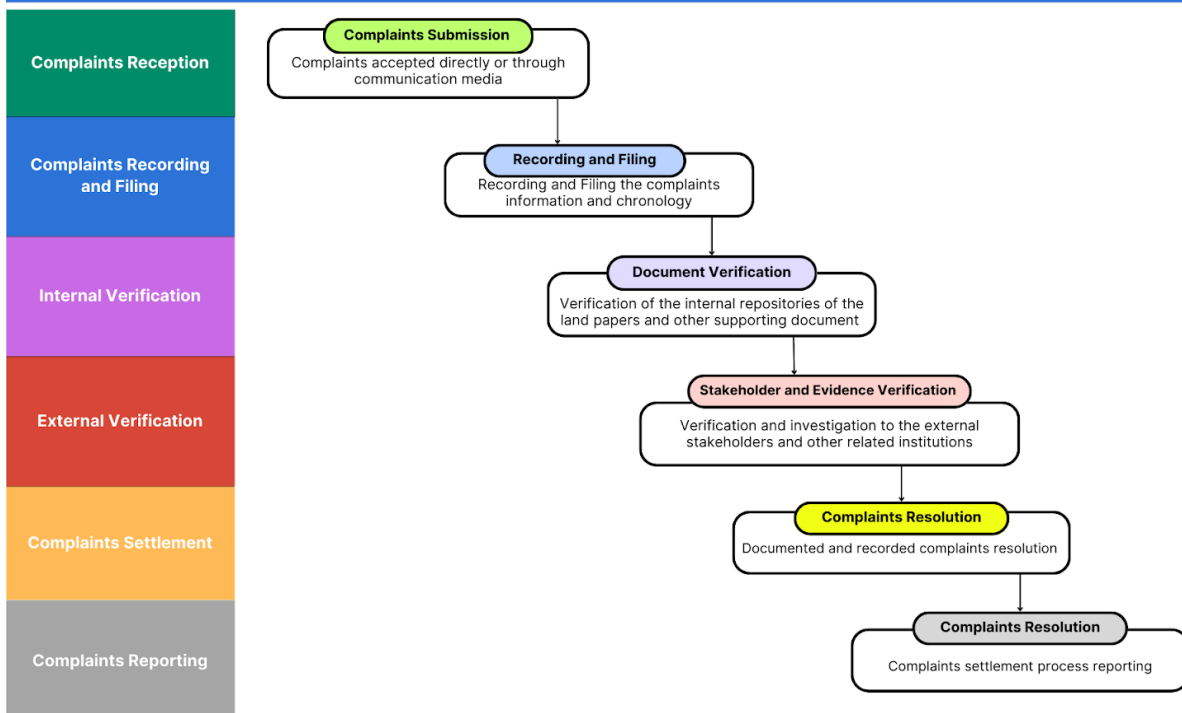
Therefore, there have been no tenure disputes in any of the locations where we operate. However, in any future plantation development carried out by Kirana Megatara, we are committed to implementing a robust FPIC process that ensures full respect for all local communities and indigenous peoples' legal and customary rights over their territories and land. The process flow of FPIC and land conflict resolution is explained in the figure below:

Flow of Kirana Megatara
FPIC Process



Gambar 1. Alur proses pelaksanaan PADIATAPA Kirana Megatara
Picture 1. Kirana Megatara FPIC Flow-process

Flow of External Land Dispute
Complaint Settlement



Gambar 2. Alur proses penyelesaian konflik lahan Kirana Megatara/
Picture2. Kirana Megatara Land Dispute Complain Settlement Flow-process